

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Permasalahan dan isu strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

Perjanjian kinerja

Pengukuran kinerja

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi berkah, rahmat, serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Sebagaimana kinerja secara logis serta tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja yang kemudian harus dilaporkan dalam bentuk LKjIP yang rutin dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat setiap tahun sekali sebagai dasar evaluasi terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipantau secara bertahap tingkat capaian dari kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun.

Gambaran Selanjutnya bila dilihat dari sisi keuangan, Anggaran total Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 20.657.352.000,00. Terdiri dari Belanja Pegawai sejumlah Rp. 318.166.000,00, belanja barang dan jasa Rp. 19.613.806.000,00, Sedangkan Belanja modal sebesar Rp.725.380.000,00. Sedangkan realisasi anggaran Tahun 2019 sejumlah Rp.17.093.318.864,00 atau sebesar 82,75%

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Semoga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarnegara, Januari 2020

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

CATUR SUBANDRIO, S.Sos
Pembina TK I
NIP. 19610715 198901 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Bupati Banjarnegara beserta Wakil Bupati Banjarnegara. Berdasarkan peraturan Perundang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud, membawa konsekuensi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kinerjanya secara optimal.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan dengan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat

DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD ;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Gambaran singkat struktur organisasi Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugasnya :

- a. Sekretaris DPRD ;
- b. Bagian Umum, terdiri dari
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha
 - 2). Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - 3). Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Bagian Keuangan, terdiri dari ;
 - 1). Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
 - 2). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri dari ;
 - 1). Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - 2). Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian; dan

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, data sumber daya manusia yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sampai saat ini adalah sebagaimana berikut:

- | | |
|--------|------------|
| 1) PNS | = 42 orang |
| 2) PTT | = 4 orang |
| 3) THL | = 12 orang |

B. Permasalahan dan Isu strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan dengan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sehingga sangat kental dengan nuansa politisnya yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang mendukung DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya menjadi instrumen kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat.

Di dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD tahun 2017-2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang ada.

Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kinerja dan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Belum semua perlengkapan dan peralatan kantor berfungsi optimal;
3. Belum optimalnya sarana sistem administrasi online;
4. Masih rendahnya kesadaran anggota DPRD untuk menghadiri rapat;
5. Masih ada target raperda inisiatif yang tidak ditetapkan;
6. Masih ada raperda yang belum di bahas;
7. Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target;
8. Masih rendahnya kompetensi tenaga ahli yang ditempatkan di DPRD;
9. Masih ada aspirasi masyarakat yang belum terdokumentasi;
10. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap kinerja DPRD.

Perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD disusun berdasar atas keterpaduan sasaran yang harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan anggota DPRD dengan target dan indikator yang harus dicapai dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil capaian kinerja dan permasalahan yang ditemukan.

Selanjutnya isu-isu strategis digunakan sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program untuk lima tahun ke depan melalui perencanaan strategis, menganalisis hambatan dan langkah-langkah antisipatif dan korektif yang ditempuh. Isu-isu strategis pada Sekretariat DPRD Kab.Banjarnegara antara lain :

1. Realisasi perda yang ditetapkan tidak sesuai dengan target propemperda;
2. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap kinerja DPRD terutama dalam penjangkauan aspirasi yang dilaksanakan oleh DPRD.
3. Masih banyaknya masyarakat yang beranggapan kurangnya kinerja anggota DPRD
4. Tingkat kepuasan masyarakat dalam penyampaian aspirasi masih rendah

Adapun rumusan dari Isu strategis di Sekretariat DPRD Kab.Banjarnegara:

1. Target perda belum sesuai dengan propemperda
2. Waktu dalam pembahasan perda sangat sedikit
3. Adanya anggapan di masyarakat tentang rendahnya kinerja DPRD
4. Penyampaian aspirasi yang belum maksimal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD

Seiring dengan berjalanya waktu telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur politik hukum dan ekonomi pada tingkat Daerah, Nasional dan Global, menjadikan kebijakan desentralisasi, proses demokratisasi, privatisasi dan globalisasi telah mewarnai dinamika penyelenggaraan Pemerintah di daerah. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan tugas-tugas pokok DPRD dibutuhkan kerjasama global antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan masyarakat.

Dasar pemikiran inilah yang mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerja melalui Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara agar berjalan beriringan selaras dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara bermartabat dan sejahtera.

Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen didalam Rencana Strategis Bupati Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 yaitu

“ Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera “

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi yaitu :

a. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.

b. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional,

intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan di perlukan Rencana Strategis, adapun rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagaimana berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan bagi DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
- d. Meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam kinerja dan penyelenggaraan kesekretariatan

Dalam rangka melaksanakan misi yang ke dua (II) yaitu ***Mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan konsep tata kelola Pemerintah yang baik***, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dilaksanakan dengan 4 (empat) indikator masing-masing, yaitu :

1. Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda.
2. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa.
3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat DPRD merupakan unsur penunjang pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati.

Sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Sasaran Strategis Sekretariat DPRD ditetapkan menjadi 2 (dua) Sasaran Strategis.

Sasaran strategis yang pertama adalah Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka mencapai sasaran strategis pertama ada 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja yaitu Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda dan rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa.

Sedangkan sasaran strategis kedua adalah Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Dalam rangka mencapai sasaran strategis pertama ada 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja ini memberikan gambaran dan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lainnya yang relevan. Format Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) dan Lampiran Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) yang menggambarkan target kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Tahun 2019, disertai pagu anggarannya dengan berpedoman pada sasaran strategis beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2019 terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kinerja, 4 (empat) Indikator Kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Target indikator kinerja pada Sekretaris DPRD (Pejabat Eselon II)

1. Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
 - 1) Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda dengan target 100%
 - 2) Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa dengan target 100%
2. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
 - 1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target nilai 76
 - 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target B

B. Target indikator kinerja pada Kabag (Pejabat Eselon III)

1. Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda
 - a) Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda dengan target 100%
 - b) Prosentase Kunja yang di laksanakan anggota DPRD dengan target 100%
 - c) Prosentase himpunan produk-produk DPRD yang dicetak dengan target 100%
 - d) Prosentase buku referensi untuk legislatif dan eksekutif yang diadakan dengan target 100%
 - e) Prosentase anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi dengan target 100%
 - f) Prosentase laporan kegiatan reses yang dilaporkan dengan target 100%
 - g) Prosentase terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dengan target 85%
2. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa
 - a) Prosentase majalah komunikatif yang tercetak dengan target 100%
 - b) Prosentase pembuatan buku memori DPRD dengan target 100%
 - c) Prosentase kegiatan sosialisasi kinerja DPRD yang di selenggarakan dengan target 100%
 - d) Persentase terpeliharanya software/ program/ sistem informasi dengan target 100%

3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
 - a) Persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor dengan target 100%
 - b) Prosentase tenaga pendukung operasional yang terpenuhi jasa administrasinya dengan target 100%
 - c) Prosentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 100%
 - d) Prosentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perengkapan kantor dengan target 100%
 - e) Prosentase pakaian dinas yang tersedia untuk anggota DPRD dengan target 100%
 - f) Prosentase kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dengan target 100%
 - g) Prosentase kebutuhan peralatan gedung kantor yang terpenuhi dengan target 100%
 - h) Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor yang terpenuhi dengan target 100%
 - i) Prosentase kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan target 100%
 - j) Prosentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dengan target 100%
 - k) Prosentase rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor yang terpenuhi dengan target 100%
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - a) Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang di susun dengan target 100%
 - b) Prosentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan target 100%

C. Target indikator kinerja pada Kasubag (Pejabat Eselon IV)

1. Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda
 - a) Jumlah Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda target 18 Perda
 - b) Jumlah Kunja yang di laksanakan anggota DPRD target 81 kali
 - c) Jumlah himpunan produk-produk DPRD yang dicetak target 1 buku
 - d) Jumlah buku referensi untuk legislatif dan eksekutif yang diadakan target 1 paket

- e) Jumlah anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang mengikuti peningkatan kegiatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 305 orang
 - f) Jumlah laporan reses yang di laporkan 2 bendel
 - g) Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan target 50 orang
2. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa
 - a) Jumlah majalah komunikatif yang tercetak target 2 edisi
 - b) Jumlah buku memori DPRD yang tercetak target 145 buku
 - c) Jumlah kegiatan sosialisasi kinerja DPRD yang di selenggarakan 7 kegiatan
 - d) Jumlah aplikasi yang dipelihara target 2 aplikasi
 3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
 - a) Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi target 18 paket
 - b) Jumlah tenaga pendukung operasional yang terpenuhi jasa administrasinya target 18 orang
 - c) Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi target 3 kegiatan
 - d) Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi target 1 paket
 - e) Jumlah pakaian dinas yang terasedia untuk anggota DPRD 300 stel baju
 - f) Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi target 1 paket
 - g) Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor yang terpenuhi target 5 paket
 - h) Jumlah kebutuhan pemeliharaan gedung kantor yang terpenuhi target 3 paket
 - i) Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 26 kendaraan
 - j) Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara target 1 paket
 - k) Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor jumlah 4 paket
 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - a) Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang di susun 8 dokumen perencanaan
 - b) Jumlah dokumen keuangan yang tersusun dalam 1 Tahun 4 dokumen

Sedangkan anggaran untuk merealisasikan target dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Total Anggaran sebesar Rp. 20.657.352.000,00 yang dialokasikan pada 6 (enam) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran total anggaran Rp. 1.930.318.200,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur total anggaran Rp. 1.293.642.800,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur total anggaran Rp. 507.072.500,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan total anggaran Rp. 25.000.000,00
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah total anggaran Rp. 16.520.661.000,00
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi total anggaran Rp. 380.657.500,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 061 Tahun 2016 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, masing-masing Perangkat Daerah telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya dari sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara terdapat 2 (dua) Sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2019. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja pada Pejabat Eselon II atau Sekretaris DPRD, 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja pada Pejabat Eselon III dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja pada Pejabat Eselon IV. Capaian/Realisasi kinerja sampai dengan 31 Desember 2019, telah tercapai semua.

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2019 dapat diilustrasikan dengan cara membandingkan antara Target Indikator Sasaran dengan Realisasinya dalam tabel Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian	
		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.	Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda	18	24	133
		Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa	100 %	105%	105
2	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	76	78,26	102,97
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (60)	CC (55)	91,6
Jumlah					102,64

Dilihat dari Tabel Indikator Kinerja Sasaran, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2019 telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 102,64% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada Rencana Aksi kegiatan.

Dalam upaya pencapaian target sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara secara berjenjang didukung oleh capaian indikator program dari Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan serta dukungan capaian indikator kegiatan dari Kepala Subagian Humas dan Protokol. Keberhasilan secara umum disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut

- ✓ Adanya disiplin dan etos kerja serta loyalitas terhadap kinerja
- ✓ Adanya kerjasama antar Kasubag dalam berkordinasi dan penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan
- ✓ Berpedoman pada jadwal dan rencana kerja serta dokumen RKA Perangkat Daerah
- ✓ Adanya koordinasi dan Komunikasi antara Sekretaris dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan semua kegiatannya.

Capaian Kinerja secara lengkap akan diilustrasikan sebagai berikut :

I. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mencapai dan mengukur sasaran Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di ukur melalui 2 (dua) Indikator.

- Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda
- Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa

1. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2019 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja		Capaian	
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda	18	24	133
Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa	100 %	105%	105

1.1 Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda.

Target kinerja yang mendukung sasaran dalam penertapan perda yang secara tugas pokok dan fungsi menjadi tanggung jawab Kasubag Perundang-undangan menargetkan 18 Perda pada tahun 2019 namun realisasinya berdasarkan hasil penetapan Propemperda adalah sebanyak 24 perda, adapun perda tersebut sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 2) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman;
- 3) Kawasan Tanpa Rokok;
- 4) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamer atau Minuman Beralkohol;
- 5) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- 6) Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara;
- 7) Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 8) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018;
- 9) Penyelenggaraan Reklame;
- 10) Penyelenggaraan Perparkiran;
- 11) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- 12) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;

- 13) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- 14) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara Yang Pengaturannya Dapat Diserahkan kepada Desa;
- 15) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Desa;
- 16) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- 17) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 18) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- 19) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 20) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 21) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 22) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
- 23) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020
- 24) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.2 Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa.

Rata rata kehadiran masyarakat pada kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD di ukur melalui kegiatan yang telah laksanakan oleh anggota DPRD, dan juga dengan indikator jumlah kehadiran masyarakat yang mengikuti kegiatan. Adapun 7 kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Saba Desa dilasanakan 2 kali
- Jumpa Pers dilasanakan 2 kali
- Dewan Menyapa dilasanakan 3 kali
- Parlementaria dilasanakan 3 kali

Adapun target jumlah orang yang mengikuti acara kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD sejumlah 600 Orang. Dengan realisasi kedatangan 630 Orang.

2. Capaian kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya :

Indikator Sasaran	SAT	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda	%	96,43	66,6 6	52,63	133
Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa	%	96,43	100	91,67	105

Sebagaimana data diatas apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, perda yang di tetapkan sesuai propemperda mengalami penurunan hal tersebut di karenakan pembahasan jadwal perda terlalu mendekati ahir tahun sehingga banyak raperda yang belum sempat di bahas. Sedangkan kehadiran masyarakat pada kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD rata-rata setiap tahunnya setabil dalam hal ini bisa di katakan antusiame masyarakat pada kegiatan yang dilaksanakan DPRD sangat bagus.

3. Capaian Kinerja s/d Tahun 2019 dibandingkan dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI s/d 2019	CAPAIAN (%)
Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda	100%	133%	133%
Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa	100%	105%	105%
Rata-rata			119%

Target pada Renstra untuk ke 2 (dua) Indikator tersebut memiliki kompetensi sebesar 100%. Sedangkan realisasi sampai tahun 2019 untuk Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda adalah 133% sehingga capainya 133%. Adapun realisasi Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa adalah 105% sehingga capainya 105%

4. Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja:

Sasaran Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja telah tercapai 100,00%. Capaian ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, dukungan anggaran sesuai kebutuhan sehingga dapat membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kinerja dan terjalannya koordinasi serta komunikasi yang baik antara para Pelaksana Kegiatan.

5. Analisis tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang menunjang pencapaian sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

Pencapaian sasaran Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. dilaksanakan dengan 3 program dan 11 kegiatan, dengan total anggaran Rp. 16.941.118.500,00 sedangkan realisasi dari anggaran Rp. 13.728.332.236,00, atau sebesar 81,04 %, sedangkan capaian kinerja sebesar 100,00% sehingga

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana secara efisien

6. Program Pendukung

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dicapai dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung tersebut antara lain :

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - Pembahasan rancangan Peraturan Daerah
 - Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah
 - Pembuatan himpunan produk-produk DPRD
 - Pengadaan buku referensi bacaan untuk legeslatif dan eksekutif
 - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
 - Kegiatan reses
 - Pembuatan majalah komunikatif DPRD
 - Pembuatan buku memori DPRD
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan pulik
 - Pemeliharaan software/program /sistem informasi

II. Sasaran Strategis : Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Untuk mencapai dan mengukur sasaran Strategis ke 2 yaitu Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur melalui 2 (dua) Indikator.

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2019 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja		Capaian	
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	76	78,26	102,97
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (60)	CC (55)	91,6

1.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mencapai sasaran meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja maupun tugas daripada DPRD Kabupaten Banjarnegara, dapat dilihat melalui tabel diatas. Indikator Kinerja Nilai/ Indeks SKM dengan target 76 dan realisasinya 78,26, capaiannya adalah 102,97% Capaian Kinerja nilai IKM diperoleh melalui survey yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menggunakan prinsip-prinsip Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Berkesinambungan, Keadilan dan Netralitas.

1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian nilai AKIP diperoleh melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Nomor 700/27/LHE/2019 Tanggal 26 Juli 2019, Sekretariat DPRD memperoleh nilai sebesar 55 (Pembulatan angka 54,60) dengan kategori CC (Cukup) hal ini jauh dari target pencapaian. Dalam penilaian evaluasi AKIP terdapat 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang dievaluasi antara lain:

- Perencanaan kinerja (Renstra, RENJA/RKT) memperoleh nilai 17,77 dari bobot penilaian 30,00%;

- Pengukuran kinerja (Pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, implemetasi pengukuran) memperoleh nilai 15,00 dari bobot penilaian 25,00%;
- Laporan kinerja (Pemenuhan pelaporan, penyajian pelaporan, pemanfaatan informasi kinerja) memperoleh nilai 10,38 dari bobot penilaian 15,00%;
- Evaluasi Kinerja (Pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, pemanfaatan evaluasi) memperoleh nilai 5,20 dari bobot penilai 10,00%;
- Capaian kinerja (output, outcome) memperoleh nilai 6,25 dari bobot penilaian 20,00

2. Capaian kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya :

Indikator Sasaran	SAT	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	-	79,46	79,69	78,26
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	%	-	44 (C)	55(CC)	

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dilihat dari data tersebut diatas, dengan hasil nilai 79,69 pada tahun 2018. sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 78,26. hal ini terjadi karena adanya nilai pada unsur penilaian pelayanan hasil dari kuesioner yang di bagikan mengalami ketidakpuasan yang mengakibatkan menurunnya nilai dari angka tahun yang lalu namun secara umum nilai SKM melampui dari target yang di tetapkan.

Penilaian AKIP didasarkan pada penilaian dari seluruh keterkaitan dokumen perencanaan yang dimana seluruh kinerja didasarkan pada perencanaan dan di evaluasi hasil kinerjanya, namun dari hasil data tersebut penilaian AKIP Sekretariat DPRD mengalami kenaikan dari target **C menjadi CC**. Adapun dilihat dari target yang ditetapkan masih sangat jauh secara pencapaian target Sekretariat DPRD mentargetkan nilai **B** pada tahun 2018. Untuk penilaian tahun 2019 dilaksanakan di tahun 2020.

3. Capaian Kinerja s/d Tahun 2019 dibandingkan dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI s/d 2019	CAPAIAN (%)
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	76	78,26	102,97
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (60)	CC (55)	91,6

Target Nilai/ Indeks AKIP pada Renstra B (60), sedangkan capaian kinerja s/d Tahun 2018 adalah CC (55) sehingga capaian kinerja terhadap Renstra adalah sebesar 91.6%

4. Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian nilai AKIP sebesar 91,6 artinya belum sampai 100 persen dari target hal tersebut terjadi bukan karena kurang ataupun tidak ada dokumen yang menjadi penilaian dalam evaluasi SAKIP namun hal tersebut terjadi karena:

- 1) Bab pada RENSTRA, berdasarkan penilaian APIP belum sinkron antar Babnya
- 2) IKU Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan tujuan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD
- 3) Rencana Program dan kegiatan serta pagu anggaran belum di jadikan sebagai dasar perencanaan yang tepat
- 4) Indikator-indikator kinerja tidak selaras pada masing-masing dokumen perencanaan.

5. Analisis tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang menunjang pencapaian sasaran kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan 4 program dan 13 kegiatan dengan realisasi anggaran sejumlah Rp. 3.364.486.628,00 atau serapan anggaran sebesar 90,55% dari total anggaran sebesar Rp. 3.716.233.500,00. Sedangkan capaian kerjanya sebesar 102,97%. sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah dilaksanakan secara efisien

6. Program Pendukung

Untuk mewujudkan meningkatnya kepuasan masyarakat dicapai dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung tersebut antara lain :

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Peny jasa administrasi perkantoran (PTT,jasa tenaga pendukung operasional kantor)
 - Peny jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Peny peralatan dan perlengkapan kantor
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Rehab sedang/berat gedung kantor

B. Realisasi Anggaran

Realisasi penggunaan anggaran secara keseluruhan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara melalui anggaran APBD Tahun 2019 telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah diuraikan di atas. Adapun anggaran yang tersisa ataupun tidak seluruhnya terserap merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran namun secara perencanaan dan pelaksanaan semua kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, penganggaran dan ketaatan terhadap peraturan - peraturan perundangan yang berlaku. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah sebagai laporan realisasi penggunaan anggaran tahun 2019. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019, mendapatkan anggaran Total sebesar Rp. 20.657.352.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.093.318.864,-. Atau sebesar 82,75% dengan realisasi Fisik sebesar 99,42%

Untuk Mencapai kedua sasaran strategis tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara menjabarkannya kedalam 6 (enam) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Tabel B
Realisasi belanja kegiatan Tahun Anggaran 2019

No	Program		Kegiatan	Jumlah	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Pembahasan rancangan Perda	1.037.281.000	685.923.813	66,13%
		2	Kunja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah	10.723.100.000	8.557.116.902	79,80%
		3	Pembuatan himpunan produk DPRD	25.000.000	24.685.000	98,74%
		4	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legeslatif	20.000.000	19.800.000	99,00%

			dan eksekutif			
		5	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.970.000.000	2.472.787.796	83,26%
		6	Kegiatan reses	1.549.530.000	1.413.873.900	91,25%
		7	Pembuatan majalah komunikatif DPRD	150.000.000	132.918.300	88,61%
		8	Pembuatan buku memori DPRD	45.750.000	43.769.600	95,67%
	TOTAL			16.520.661.000	13.350.875.311	80,81%
2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan pulik	343.657.500	307.320.725	89,43%
		2	Pemeliharaan software/program /sistem informasi	37.000.000	35.100.000	94,86%
	TOTAL			380.657.500	342.420.725	89,96%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	25.000.000	22.384.450	89,54%
	TOTAL			25.000.000	22.384.450	89,54%
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	41.500.000	40.850.000	98,43%
		2	Penyediaan bahan logistik kantor	1.321.462.200	1.161.558.541	87,90%
		3	Peny jasa administrasi perkantoran (PTT,jasa tenaga pendukung operasional kantor)	369.956.000	344.456.000	93,11%
		4	Peny jasa peralatan dan perlengkapan kantor	132.600.000	98.790.680	74,50%
		5	Peny peralatan dan perlengkapan kantor	25.000.000	25.000.000	100,00%

		6	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	39.800.000	35.036.200	88,03%
	TOTAL			1.930.318.200	1.705.691.421	88,36%
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	507.072.500	440.244.568	86,82%
	TOTAL			507.072.500	440.244.568	86,82%
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	33.062.800	32.887.800	99,47%
		2	Pengadaan peralatan gedung kantor	323.580.000	314.925.000	97,33%
		3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000.000	59.302.500	79,07%
		4	Pem rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	280.000.000	249.595.089	89,14%
		5	Pem rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	80.000.000	79.548.000	99,44%
		6	Rehab sedang/berat gedung kantor	502.000.000	495.444.000	98,69%
	TOTAL			1.293.642.800	1.231.702.389	95,21%
	JUMLAH TOTAL PROGRAM			20.657.352.000	17.093.318.864	82,75%

BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun Anggaran 2019, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, yaitu Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat. Untuk mengukur dan menilai sasaran tersebut di gunakan 4 (empat) indikator. Sasaran 1 diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda, dan rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa. Sasaran 2 diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu nilai survey kepuasan masyarakat dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Hasil pengukuran dari Indikator Meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda dengan capaian 133 %. **Hasil pengukuran dari indikator** Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD dengan capaian 105%. **Hasil pengukuran dari indikator** Nilai survey kepuasan masyarakat dengan capaian 102,97 dan **Hasil pengukuran dari indikator** Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan capaian 55 atau kategori CC.

Langkah-langkah untuk antisipatif dan Evaluasi yang akan diterapkan dan juga ditempuh dalam rangka mensiasati kekurangan dalam pencapaian sasaran antara lain :

- a. Pembahasan semua Raperda seharusnya sesuai jadwal dan direncana lebih awal bukan menjelang akhir tahun.
- b. Peningkatan pemahaman dan ketrampilan perencanaan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi dalam setiap Subag di lingkup sekretariat DPRD.
- c. Perlunya efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai program.
- d. Kesadaran , tanggung jawab, dan kerjasama seluruh karyawan di lingkungan Setwan perlu ditingkatkan melalui pembinaan (*staf meeting*) secara berkala.
- e. Persamaan sudut pandang dari semua pemangku kebijakan dalam segala sisi di mulai dari perencanaan sampai evaluasi semua kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019. dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, Hal tersebut tidak terlepas dari para pengelola kegiatan dan pelaksana teknis yang membantu dalam mewujudkan serta mendorong berjalanya semua kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. Para pemangku kebijakan dan para pengelola kegiatan beserta pelaksana teknis telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan serta menjalin komunikasi antar bagian sehingga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Kami mengharapkan kritik dan saran serta masukan dari semua pihak yang telah menjalankan semua kegiatan untuk mendukung terwujudnya misi dan visi Bupati Banjarnegara melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing, guna penyempurnaan pelaksanaannya kegiatan dimasa mendatang.

Banjarnegara, Januari 2020

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

CATUR SUBANDRIO,S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19610715 198901 1 002

LAMPIRAN